

Estetika Aktivisme Digital: Konstruksi Budaya Protes melalui Platform Media Sosial Kontemporer

**M. Johaeri Irhas¹, Mohamad Najih Arnik², Nur Shofia Asyrof³,
Misbah Bahauddin Faqih⁴, Dika Okta Alief Tiyasari⁵, Tadjoer Ridjal⁶**

^{1 s.d.6} Universitas Darul 'Ulum Jombang, Jawa Timur, Indonesia
Email Koresponden: misbahbahauddinf@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah secara fundamental praktik aktivisme kontemporer, terutama melalui pemanfaatan estetika digital sebagai medium utama ekspresi politik. Aktivisme digital tidak hanya mengandalkan argumen rasional dan struktur organisasi formal, tetapi juga visual, narasi singkat, simbol, dan format kreatif yang menyesuaikan dengan karakteristik platform. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran estetika dalam membentuk budaya gerakan serta dinamika relasinya dengan logika algoritmik dan ekonomi platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis estetika aktivisme digital sebagai praktik kultural dan politik dalam konteks media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur kritis dan analisis konseptual terhadap kajian mutakhir mengenai aktivisme digital, budaya gerakan (*movement culture*), dan platformisasi media. Analisis data dilakukan secara tematik dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola relasi antara estetika, identitas kolektif, partisipasi, dan struktur platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa estetika aktivisme digital berperan penting dalam konstruksi makna, pembentukan identitas kolektif, serta penguatan partisipasi dan solidaritas di ruang digital. Namun, estetika tersebut juga menghadapi paradoks akibat dominasi logika platform, seperti komodifikasi konten, penyederhanaan pesan politik, serta kerentanan terhadap kontrol algoritmik. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan estetika digital yang lebih reflektif dan kritis agar strategi visibilitas tidak mengaburkan tujuan politik dan keberlanjutan gerakan sosial.

Kata kunci : Aktivisme Digital, Estetika Digital, Budaya Gerakan, Media Sosial, Logika Platform

Pendahuluan

Tatanan partisipasi politik global mengalami transformasi fundamental dengan hadirnya teknologi digital dan platform media sosial kontemporer. Ruang digital seperti TikTok, Instagram, dan X (sebelumnya Twitter) telah menjadi wadah utama bagi ekspresi ketidakpuasan politik, koordinasi kolektif, dan konstruksi narasi perlawanan (Jackson et al., 2020). Fenomena gerakan seperti #BlackLivesMatter dan #ClimateStrike merepresentasikan pergeseran dari model protes fisik konvensional menuju



ekspresi digital yang memanfaatkan elemen visual, narasi ringkas, dan pola partisipasi kolaboratif. Pola ini mencerminkan evolusi gerakan sosial sebagaimana dikaji Polletta (dalam *Movement Cultures*) yang menekankan bahwa gerakan tidak hanya berupaya mengubah kebijakan, tetapi juga aktif menciptakan budaya gerakan (*movement cultures*) alternatif melalui praktik operasional internal. Dalam ekosistem digital, manifestasi budaya gerakan tersebut terlihat melalui estetika konten, bahasa visual, dan ritual partisipasi yang khas platform, yang berfungsi ganda sebagai alat mobilisasi sekaligus ekspresi identitas kolektif.

Bentuk perlawanan politik saat ini mengalami transformasi dari model tradisional—seperti demonstrasi jalanan dan lobi institusional—menuju format yang bersifat artistik dan berbasis produksi konten digital. Generasi muda (Generasi Z dan Milenial) secara kreatif memanfaatkan fitur platform media sosial—termasuk filter *augmented reality*, audio viral, format video pendek, dan meme—sebagai instrumen penyampaian pesan politik yang atraktif, emosional, dan mudah tersebar (Yang & Tang, 2022). Estetika digital berkembang menjadi perangkat retorika baru yang tidak hanya berfungsi informatif, tetapi juga mampu membangkitkan respons afektif, membentuk identitas kolektif, dan memperluas jangkauan pengaruh gerakan (Nova & Irma, 2025). Konsep budaya gerakan yang diulas Polletta memberikan lensa analitis untuk memahami fenomena ini bukan sekadar sebagai strategi komunikasi, melainkan sebagai upaya membangun komunitas simbolis yang merepresentasikan tatanan sosial alternatif. Dalam aktivisme digital, praktik prefiguratif—sebagaimana dijelaskan Polletta—terwujud melalui kurasi estetika akun media sosial, desain identitas visual kampanye, dan mekanisme tata kelola partisipasi yang mencerminkan prinsip inklusivitas dan demokrasi partisipatif.

Namun, proses estetisasi aktivisme ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kedalaman keterlibatan politik, sebuah ketegangan yang inheren dalam budaya gerakan. Beberapa analis mengkritik kecenderungan ini sebagai bentuk “*slacktivism*”—aktivisme simbolis dengan dampak struktural terbatas (Morozov, 2019). Polletta mengingatkan bahwa dikotomi instrumental-ekspresif sering kali reduktif, karena praktik yang tampak

ekspresif (seperti penciptaan simbol atau ritual bersama) dapat memiliki manfaat instrumental nyata dalam memperkuat komitmen anggota. Metrik keterlibatan digital (like, share, komentar) berpotensi menciptakan ilusi partisipasi tanpa aksi konkret, namun penelitian menunjukkan aktivisme digital dapat menjadi pintu masuk menuju keterlibatan substantif seperti penggalangan dana dan tekanan kebijakan (Vromen, 2017).

Platform media sosial berfungsi sebagai ruang produksi budaya gerakan di mana norma, identitas kolektif, dan jejaring solidaritas terus dibentuk ulang. Melalui fitur kolaboratif seperti duet di TikTok atau thread di Twitter, aktivis menciptakan bahasa visual dan naratif bersama yang sering kali bersifat ironis, kreatif, dan mudah beradaptasi (Bennett & Segerberg, 2018). Proses ini melahirkan budaya protes yang cair, dinamis, dan responsif terhadap perubahan konteks sosio-politik. Polletta menegaskan bahwa budaya gerakan jarang lahir dari kekosongan (*de novo*), melainkan kerap meminjam dan mengadaptasi norma dari ranah lain seperti hubungan kekerabatan, persahabatan, atau komunitas keagamaan. Dalam aktivisme digital, adaptasi tersebut terjadi melalui pemanfaatan konvensi platform—seperti format video tutorial, challenge, atau sesi tanya jawab—untuk menyampaikan pesan politik. Logika platform dan budaya partisipatif internet menjadi “bahan baku” baru bagi pembentukan budaya gerakan kontemporer.

Budaya protes digital juga dicirikan oleh logika viralitas, di mana konten dirancang untuk menarik perhatian dalam ekonomi perhatian yang kompetitif. Hal ini mendorong aktivis mengadopsi strategi kreatif seperti humor, parodi, atau konten emosional untuk menembus algoritma (Pearce et al., 2020). Namun, ketergantungan pada logika platform komersial mengandung risiko komodifikasi pesan politik, di mana konten aktivisme dapat tereduksi menjadi tren sesaat. Di sini muncul paradoks budaya gerakan: di satu sisi, gerakan perlu mengadopsi bentuk-bentuk yang familier untuk mendifusikan pesan; di sisi lain, adopsi bentuk mainstream dapat mengikis muatan politik radikal—fenomena yang diilustrasikan Polletta melalui contoh lagu “Kumbaya” yang kehilangan makna politik setelah diadopsi arus utama.

Aktivisme digital menghadapi tantangan struktural dan kultural yang tercermin dalam kajian budaya gerakan. Pertama, algoritma platform yang tidak transparan dapat membatasi jangkauan konten melalui mekanisme seperti shadow banning dan penyaringan otomatis (Klonick, 2020). Kedua, platform media sosial didominasi logika komersial yang mendorong optimasi keterlibatan (engagement) sering kali dengan mengorbankan kompleksitas isu politik (Zuboff, 2019). Ketiga, aktivisme digital rentan menyebabkan kelelahan aktivis (activist burnout) akibat tuntutan produksi konten berkelanjutan dan toksisitas ruang digital (Jackson & Foucault Welles, 2021)—tantangan yang merefleksikan “dilema organisasi” dan “dilema menjangkau ke dalam dan ke luar” yang didiskusikan dalam kerangka budaya gerakan.

Dilema antara menjaga kemurnian pesan ideologis dan mengadopsi strategi komunikasi efektif di platform arus utama merupakan inti ketegangan budaya gerakan antara orientasi instrumental dan ekspresif (Polletta, 2002). Aktivis sering dihadapkan pada pilihan antara menggunakan estetika sesuai norma platform untuk jangkauan luas, atau mempertahankan bentuk yang konsisten dengan nilai gerakan namun berisiko terpinggirkan secara algoritmik. Polletta menunjukkan bahwa pilihan strategis semacam ini merupakan pertunjukan kultural (cultural performance)—termasuk pertunjukan “rasionalitas instrumental”—yang perlu dikaji makna dan konsekuensinya.

Studi aktivisme digital masih terfokus pada aspek mobilisasi, jejaring, dan dampak politik, sementara eksplorasi dimensi estetika dan budaya visualnya relatif terbatas (Treré, 2019). Riset banyak terkonsentrasi pada konteks Barat, dengan minimnya studi tentang konstruksi estetika aktivisme digital di konteks non-Barat termasuk Indonesia. Selain itu, belum banyak kajian yang mengintegrasikan perspektif budaya gerakan secara komprehensif—seperti dirumuskan Polletta—dengan teori media digital untuk memahami bagaimana estetika bukan sekadar alat, melainkan bagian integral dari proses pembentukan makna dan identitas kolektif. Analisis aspek “warisan dan kemunculan” (inherited and emergent) budaya gerakan digital masih langka, padahal pendekatan ini—seperti

dikemukakan Polletta—dapat mengungkap bagaimana praktik gerakan (termasuk yang tampak instrumental) sesungguhnya merupakan pertunjukan budaya.

Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana aktivisme kontemporer tidak hanya tentang “substansi pesan”, tetapi juga tentang “modalitas penyampaian” yang estetis dan digital sebagai manifestasi budaya gerakan. Dengan menganalisis konstruksi estetika aktivisme digital melalui lensa konsep budaya gerakan, penelitian ini memberikan kontribusi: (1) memperkaya kajian budaya gerakan dengan konteks media baru, (2) mengembangkan studi komunikasi politik digital dengan pendekatan kultural, dan (3) menghubungkan kajian budaya visual dengan teori gerakan sosial. Secara praktis, temuan penelitian dapat membantu aktivis dan organisasi masyarakat sipil merancang strategi komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan kesadaran akan dimensi kultural yang dibangun. Penelitian ini juga memperkaya diskusi demokrasi digital dan transformasi ruang publik di Indonesia dengan perspektif yang diilhami kerangka Polletta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hal yang menarik untuk dikaji secara mendalam adalah bagaimana estetika digital dikonstruksi sebagai praktik budaya gerakan (*movement culture*) dalam aktivisme kontemporer di platform media sosial, dan bagaimana konstruksi tersebut berfungsi sebagai bentuk politik prefiguratif sekaligus menghadapi paradoks antara ekspresi identitas oposisional dengan tuntutan strategis algoritmik platform komersial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-interpretatif, karena bertujuan memahami secara mendalam konstruksi makna, praktik budaya, dan estetika aktivisme digital sebagai bagian dari *movement culture* di media sosial (Wijaya et al., 2025). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kultural yang berpijak pada perspektif budaya gerakan dan kajian media digital, dengan menempatkan konten media sosial sebagai teks kultural yang diproduksi,

disirkulasikan, dan dimaknai dalam konteks sosio-teknis platform (Cox & Flesher Fominaya, 2018; Treré, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan terhadap konten aktivisme digital di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X (Twitter), serta dokumentasi digital berupa unggahan visual, video, meme, dan narasi kampanye yang relevan dengan isu aktivisme kontemporer (Bennett & Segerberg, 2018; Yang & Tang, 2022). Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif tematik dan analisis visual-kultural, dengan tahapan reduksi data, kategorisasi tema, serta interpretasi makna estetika dan praktik prefiguratif dalam konteks budaya gerakan digital, sekaligus mengaitkannya dengan logika platform dan ekonomi perhatian (Braun & Clarke, 2019; Milan, 2020).

Pembahasan/hasil

A. Konstruksi Estetika Aktivisme Digital di Media Sosial

Dalam lanskap aktivisme kontemporer, estetika digital menempati posisi yang semakin strategis dalam praktik gerakan sosial yang beroperasi melalui media sosial. Estetika dalam konteks ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai unsur visual pelengkap, melainkan sebagai mekanisme kultural dan politis yang menentukan bagaimana pesan perjuangan dirancang, dikomunikasikan, dan diterima oleh publik digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X menyediakan ruang sekaligus batasan teknis yang mendorong aktivis untuk menyampaikan pesan politik dalam format yang ringkas, visual, dan berorientasi pada keterlibatan audiens, sehingga estetika berfungsi sebagai medium utama artikulasi protes digital (Bennett & Segerberg, 2018).

Pembentukan estetika aktivisme digital sangat dipengaruhi oleh karakteristik spesifik tiap platform. Instagram, dengan dominasi visual statis dan fitur unggahan berurutan, mendorong pola aktivisme yang menekankan kerapian visual, konsistensi warna, serta penyusunan informasi secara sistematis melalui infografis. Praktik ini memungkinkan aktivis membangun identitas visual yang stabil dan mudah dikenali, sekaligus menyampaikan isu politik secara bertahap dan terstruktur (Burgess & Green, 2018). Sebaliknya, TikTok menghadirkan ruang ekspresi

yang lebih dinamis dan performatif melalui video singkat, penggunaan audio populer, serta fitur interaksi kolaboratif. Dalam konteks ini, aktivisme sering dikemas dalam bentuk narasi personal dan emosional yang menampilkan kesan spontan serta autentik, sehingga memperkuat keterhubungan afektif dengan audiens (Yang & Tang, 2022). Sementara itu, X membentuk estetika yang lebih bersifat diskursif, ditandai oleh kecepatan produksi wacana, penggunaan tagar, dan narasi argumentatif yang padat.

Estetika visual dalam aktivisme digital berperan penting dalam proses pembingkaihan isu politik. Melalui gambar, video, dan simbol visual, persoalan sosial yang kompleks dapat disajikan secara lebih ringkas dan komunikatif tanpa sepenuhnya kehilangan dimensi kritisnya. Visualisasi memungkinkan pesan politik menjangkau khalayak yang lebih luas dengan cepat, sekaligus membangkitkan respons emosional yang menjadi penggerak partisipasi (Cabanes & Cornelio, 2019). Dalam situasi ekonomi perhatian yang sarat kompetisi, daya tarik visual menjadi faktor krusial agar konten aktivisme mampu bersaing dengan arus konten hiburan dan komersial yang mendominasi ruang digital.

Selain aspek visual, konstruksi estetika aktivisme digital juga ditopang oleh penggunaan narasi singkat dan pengalaman personal. Format komunikasi media sosial yang serba cepat mendorong aktivis untuk mengaitkan isu struktural dengan cerita keseharian, testimoni individu, atau pengalaman langsung. Pendekatan ini tidak hanya memudahkan pemahaman audiens, tetapi juga menciptakan kedekatan emosional yang memperkuat keterlibatan personal dalam gerakan. Pola ini sejalan dengan logika aksi konektif, di mana partisipasi politik tidak lagi bergantung pada identitas kolektif yang kaku, melainkan pada resonansi personal terhadap isu yang diangkat (Bennett & Segerberg, 2018).

Meme menjadi salah satu ekspresi estetika yang paling menonjol dalam aktivisme digital. Sebagai bentuk budaya partisipatif, meme memungkinkan pesan politik disebarluaskan melalui humor, sindiran, dan referensi budaya populer. Karakter meme yang fleksibel dan mudah direproduksi membuka ruang partisipasi kreatif yang luas, bahkan bagi individu yang tidak terikat pada struktur organisasi gerakan formal (Milner,

2016). Melalui meme, kritik politik dapat disampaikan secara ringan namun tajam, sekaligus membangun solidaritas simbolik di antara partisipan. Namun demikian, penggunaan meme juga mengandung risiko reduksi makna ketika isu politik yang kompleks disederhanakan secara berlebihan atau terlepas dari konteks sosial yang melingkupinya.

Konstruksi estetika aktivisme digital tidak dapat dilepaskan dari pengaruh algoritma platform media sosial. Sistem algoritmik cenderung mengutamakan konten dengan tingkat interaksi tinggi, sehingga secara tidak langsung membentuk preferensi estetika tertentu dalam aktivisme digital. Kondisi ini mendorong aktivis untuk menyesuaikan gaya visual, format narasi, dan pilihan simbol agar selaras dengan logika visibilitas platform (Treré, 2019). Akibatnya, estetika aktivisme digital sering kali merupakan hasil kompromi antara kebutuhan mengekspresikan pesan politik dan tuntutan untuk tetap terlihat dalam arus algoritmik.

Lebih jauh, estetika digital berkontribusi pada pembentukan identitas simbolik gerakan di ruang daring. Konsistensi penggunaan elemen visual, gaya bahasa, dan narasi memungkinkan gerakan menciptakan citra kolektif yang berfungsi sebagai penanda afiliasi sekaligus alat konsolidasi solidaritas. Identitas visual ini mempermudah proses penyebaran pesan lintas jaringan dan memperkuat rasa kebersamaan di antara partisipan yang tersebar secara geografis (Milan, 2020). Dengan demikian, estetika berperan sebagai perekat kultural yang menghubungkan individu-individu dalam kerangka makna bersama.

Secara keseluruhan, konstruksi estetika aktivisme digital di media sosial merupakan proses sosial dan kultural yang bersifat dinamis. Estetika tidak hanya menjadi sarana komunikasi politik, tetapi juga berfungsi sebagai medium produksi makna, pembentukan identitas, dan pengelolaan afeksi dalam gerakan sosial kontemporer. Melalui adaptasi terhadap karakteristik platform, aktivisme digital membangun bahasa protes yang khas, sekaligus membuka kemungkinan baru bagi partisipasi politik dan pembentukan ruang publik di era media digital.

B. Estetika Digital sebagai Praktik Budaya Gerakan (Movement Culture)

Dalam perkembangan gerakan sosial mutakhir, estetika digital memainkan peran yang semakin penting sebagai bagian dari pembentukan budaya gerakan. Estetika dalam aktivisme digital tidak dapat direduksi menjadi sekadar sarana penyampaian pesan, melainkan harus dipahami sebagai praktik kultural yang secara aktif membentuk cara gerakan memaknai dirinya, mengorganisasi partisipasi, serta membangun relasi sosial di ruang digital. Pendekatan budaya gerakan menempatkan praktik simbolik dan ekspresif sebagai elemen konstitutif gerakan sosial, bukan sebagai aspek tambahan yang terpisah dari tujuan politiknya (Cox & Flesher Fominaya, 2018). Dalam konteks media sosial, estetika digital menjadi salah satu medium utama bagi produksi dan reproduksi budaya gerakan tersebut.

Estetika digital sebagai praktik budaya gerakan tercermin dalam pola-pola representasi visual, gaya narasi, serta bentuk interaksi yang berkembang di dalam komunitas aktivisme daring. Melalui pengulangan format visual tertentu, pemilihan bahasa yang khas, dan konvensi partisipasi yang disepakati secara implisit, gerakan membangun seperangkat norma kultural yang membedakannya dari ruang politik formal maupun komunikasi institusional. Praktik ini sejalan dengan pemahaman budaya gerakan sebagai kumpulan kebiasaan, ritual, dan aturan tidak tertulis yang memberi bentuk konkret pada nilai-nilai ideologis yang dianut bersama (Cox & Flesher Fominaya, 2018). Di ruang digital, kebiasaan tersebut tampak dalam cara konten dikurasi, cara audiens diajak berinteraksi, serta cara perbedaan pendapat dinegosiasikan.

Salah satu fungsi utama estetika digital dalam budaya gerakan adalah pembentukan identitas kolektif. Identitas ini tidak selalu dibangun melalui keanggotaan formal atau struktur organisasi yang jelas, melainkan melalui afiliasi simbolik yang dimediasi oleh visual, narasi, dan gaya komunikasi yang konsisten. Penggunaan elemen estetika tertentu—seperti simbol visual, warna, slogan, atau format konten—memungkinkan individu mengenali dan menegaskan posisinya sebagai bagian dari gerakan, meskipun keterlibatan mereka bersifat sporadis atau berbasis jejaring personal (Milan, 2020). Dalam lanskap digital yang terfragmentasi, estetika

berfungsi sebagai penanda kolektif yang menyatukan partisipan lintas latar belakang sosial dan geografis.

Lebih dari itu, estetika digital menjadi wahana penting bagi praktik politik prefiguratif dalam aktivisme kontemporer. Politik prefiguratif merujuk pada upaya gerakan untuk menghidupkan nilai-nilai yang diperjuangkan melalui praktik sehari-hari, bukan semata-mata melalui tuntutan perubahan struktural di masa depan (Yates, 2021). Dalam ruang digital, nilai-nilai seperti kesetaraan, keterbukaan, dan kolaborasi sering diwujudkan melalui estetika partisipatif yang mendorong kontribusi luas dan non-hierarkis. Format konten yang mudah direplikasi, narasi personal yang dihargai, serta ruang interaksi yang relatif terbuka mencerminkan upaya membangun budaya politik alternatif yang selaras dengan visi normatif gerakan.

Estetika digital juga berperan dalam membentuk budaya partisipasi yang khas dalam aktivisme daring. Partisipasi tidak lagi terbatas pada aksi fisik atau keanggotaan organisasi, melainkan mencakup praktik-praktik simbolik seperti membagikan konten, menggunakan tagar, memproduksi ulang visual, atau menciptakan meme. Praktik-praktik ini membentuk ritual partisipatif yang memperkuat rasa keterhubungan dan solidaritas di antara partisipan, meskipun mereka tidak saling mengenal secara langsung (Papacharissi, 2015). Dalam konteks ini, estetika berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur bentuk partisipasi yang dianggap sah, relevan, dan bermakna dalam budaya gerakan digital.

Dimensi afektif juga menjadi aspek penting dalam memahami estetika digital sebagai praktik budaya gerakan. Media sosial merupakan ruang di mana emosi berperan sentral dalam mempertahankan keterlibatan dan solidaritas. Pilihan visual, musik, ritme narasi, dan gaya penyampaian pesan sering kali dirancang untuk memicu respons emosional tertentu, seperti empati, kemarahan moral, atau harapan kolektif. Emosi-emosi ini tidak hanya bersifat individual, tetapi membentuk atmosfer afektif bersama yang menopang keberlangsungan gerakan (Flam & King, 2021). Dengan demikian, estetika digital berfungsi sebagai sarana pengelolaan emosi kolektif yang memperkuat kohesi internal gerakan.

Dalam kerangka budaya gerakan, estetika digital juga dapat dipahami sebagai hasil proses adaptasi dan hibridisasi kultural. Gerakan sosial jarang menciptakan praktik kultural dari nol; sebaliknya, mereka kerap mengadopsi dan menyesuaikan norma dari ranah sosial lain, termasuk budaya populer dan konvensi media digital (Milan, 2020). Aktivisme digital memanfaatkan format yang sudah akrab bagi pengguna media sosial—seperti video pendek, meme, atau cerita personal—untuk menyampaikan pesan politik. Proses adaptasi ini memungkinkan gerakan menjangkau audiens yang lebih luas, sekaligus membangun budaya gerakan yang terasa relevan dengan pengalaman sehari-hari partisipan.

Namun demikian, estetika digital sebagai praktik budaya gerakan tidak terlepas dari ketegangan internal. Salah satu ketegangan utama berkaitan dengan hubungan antara keterbukaan partisipasi dan konsistensi identitas kolektif. Estetika yang mudah direplikasi memang memperluas jangkauan dan inklusivitas, tetapi pada saat yang sama berpotensi menghasilkan interpretasi yang beragam dan tidak selalu sejalan dengan kerangka nilai inti gerakan. Ketegangan ini mencerminkan sifat budaya gerakan yang dinamis dan terus dinegosiasikan melalui praktik sehari-hari, bukan sebagai entitas yang statis dan homogen (Cox & Flesher Fominaya, 2018).

Selain itu, estetika digital sebagai budaya gerakan beroperasi dalam konteks kekuasaan platform media sosial. Aturan komunitas, desain antarmuka, dan algoritma distribusi konten turut membentuk praktik estetika aktivisme digital. Gerakan harus menavigasi batasan-batasan tersebut sembari mempertahankan orientasi nilai dan identitas kulturalnya. Proses negosiasi ini menghasilkan bentuk-bentuk estetika yang mencerminkan kompromi antara aspirasi politik gerakan dan tuntutan visibilitas platform (Treré, 2019). Dalam perspektif budaya gerakan, kompromi ini merupakan bagian dari pertunjukan kultural yang memperlihatkan bagaimana gerakan merespons dan memaknai struktur kekuasaan digital.

Estetika digital juga berkontribusi pada pembentukan memori kolektif gerakan. Arsip digital berupa unggahan, video, dan simbol visual

memungkinkan nilai, praktik, dan pengalaman gerakan terdokumentasi serta disirkulasikan lintas waktu. Memori ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran dan inspirasi bagi praktik aktivisme di masa mendatang (Milan, 2020). Dengan demikian, estetika digital berperan dalam menjaga kesinambungan budaya gerakan di luar momen mobilisasi tertentu.

Secara keseluruhan, estetika digital sebagai praktik budaya gerakan menunjukkan bahwa aktivisme digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas komunikasi atau strategi mobilisasi. Estetika merupakan fondasi kultural yang membentuk cara gerakan memproduksi makna, membangun identitas, mengelola emosi, dan mempertahankan keberlanjutan kolektifnya. Dengan menempatkan estetika digital dalam kerangka budaya gerakan, analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dalam studi aktivisme digital, yang mampu menangkap kompleksitas praktik politik di era media sosial.

C. Paradoks Estetika Aktivisme Digital dalam Logika Platform Media Sosial

Aktivisme digital berkembang dalam ekosistem media sosial yang dikendalikan oleh kepentingan teknologis dan ekonomi perusahaan platform. Ruang ini bukan sekadar medium netral bagi ekspresi politik, melainkan struktur yang secara aktif membentuk cara pesan diproduksi, disebarkan, dan diterima. Dalam konteks tersebut, estetika aktivisme digital berada dalam posisi yang paradoksal: ia menjadi sarana utama artikulasi kritik sosial dan pembentukan identitas gerakan, namun sekaligus harus tunduk pada logika platform yang mengutamakan visibilitas, keterlibatan pengguna, dan efisiensi algoritmik. Paradoks ini menempatkan estetika sebagai medan tawar-menawar antara nilai politik gerakan dan struktur kekuasaan digital yang melingkupinya (Treré, 2019).

Salah satu sumber utama paradoks tersebut terletak pada peran algoritma dalam mengatur sirkulasi konten. Algoritma platform media sosial dirancang untuk memaksimalkan interaksi pengguna demi kepentingan ekonomi berbasis iklan dan data. Akibatnya, konten yang dianggap menarik

secara emosional, mengikuti tren, atau mudah dikonsumsi cenderung memperoleh prioritas distribusi (van Dijck et al., 2018). Dalam situasi ini, aktivisme digital sering terdorong untuk menyesuaikan estetika pesan politik agar kompatibel dengan mekanisme algoritmik, meskipun penyesuaian tersebut berpotensi mengorbankan kompleksitas analisis dan kedalaman kritik sosial.

Ketegangan antara daya tarik visual dan kedalaman politik menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari paradoks estetika aktivisme digital. Di satu sisi, gerakan berupaya menyampaikan analisis struktural yang kritis dan reflektif; di sisi lain, logika platform mendorong penggunaan format komunikasi yang singkat, emosional, dan cepat viral. Akibatnya, estetika aktivisme digital kerap bergeser ke arah simbolisasi dan penyederhanaan pesan, seperti slogan visual, potongan video singkat, atau representasi emosional yang mudah dikenali (Gerbaudo, 2021). Meskipun strategi ini efektif dalam menarik perhatian, terdapat risiko bahwa pesan politik menjadi tereduksi menjadi ekspresi permukaan yang kurang mendorong pemahaman mendalam atau tindakan berkelanjutan.

Paradoks lain muncul dari proses komodifikasi estetika aktivisme digital. Dalam ekonomi platform, setiap bentuk konten—termasuk konten yang bersifat kritis dan oposisional—berpotensi diubah menjadi sumber nilai ekonomi melalui akumulasi data dan peningkatan lalu lintas pengguna. Dengan demikian, ekspresi perlawanan yang disebarluaskan secara luas justru dapat berkontribusi pada penguatan sistem ekonomi digital yang menjadi sasaran kritiknya (Zuboff, 2019). Estetika aktivisme digital, dalam hal ini, berada dalam situasi kontradiktif: ia menantang ketimpangan sosial, tetapi sekaligus terintegrasi dalam mekanisme kapitalisme platform.

Proses komodifikasi tersebut juga tercermin dalam adopsi estetika aktivisme oleh budaya populer dan praktik komersial. Simbol, gaya visual, atau slogan yang berasal dari gerakan sosial dapat dengan cepat diserap ke dalam kampanye pemasaran atau tren hiburan, sehingga kehilangan konteks politik awalnya. Ketika estetika perlawanan direduksi menjadi gaya atau identitas visual tanpa komitmen ideologis, makna politiknya berisiko

tereduksi atau bahkan dinetralisasi (van Dijck et al., 2018). Dalam perspektif budaya gerakan, fenomena ini mencerminkan dilema antara kebutuhan untuk menjangkau audiens luas dan risiko pengaburan pesan politik.

Paradoks estetika aktivisme digital juga berkaitan dengan bentuk partisipasi yang difasilitasi oleh platform media sosial. Media sosial memungkinkan keterlibatan politik melalui tindakan simbolik yang relatif mudah, seperti menyukai, membagikan, atau menggunakan tagar tertentu. Bentuk partisipasi ini sering dipandang sebagai ekspresi politik yang dangkal karena tidak selalu diikuti oleh aksi kolektif yang berkelanjutan. Kritik terhadap fenomena ini sering dirumuskan dalam istilah *slacktivism*, yang menyoroti kesenjangan antara ekspresi simbolik dan perubahan struktural nyata (Morozov, 2019).

Namun, dari sudut pandang budaya gerakan, partisipasi simbolik tidak dapat sepenuhnya dipandang sebagai praktik yang tidak bermakna. Praktik estetis yang tampak ringan dapat berfungsi sebagai pintu masuk bagi keterlibatan politik yang lebih dalam, sekaligus berperan dalam pembentukan identitas kolektif dan solidaritas afektif (Cox & Flesher Fominaya, 2018). Paradoksnya, logika platform yang memfasilitasi partisipasi cepat dan terfragmentasi dapat memperluas jangkauan gerakan, tetapi pada saat yang sama menyulitkan proses konsolidasi politik jangka panjang.

Paradoks lain yang tak kalah penting berkaitan dengan hubungan antara visibilitas dan kerentanan. Upaya meningkatkan jangkauan melalui estetika yang menarik sering kali membuat aktivisme digital lebih mudah terdeteksi oleh mekanisme moderasi dan pengawasan platform. Kebijakan moderasi yang tidak selalu transparan membuka kemungkinan pembatasan distribusi konten, penghapusan unggahan, atau bahkan penonaktifan akun tanpa penjelasan yang memadai (Gillespie, 2018). Dalam konteks ini, estetika yang terlalu eksplisit atau konfrontatif justru dapat mengurangi visibilitas gerakan, sementara pendekatan yang lebih simbolik atau ambigu terkadang lebih efektif untuk bertahan dalam sistem platform.

Kondisi tersebut mendorong gerakan untuk mengembangkan strategi estetika yang adaptif dan reflektif. Aktivis kerap bereksperimen dengan berbagai bentuk representasi visual dan naratif—seperti penggunaan humor, ironi, atau metafora—sebagai cara menyampaikan kritik politik tanpa secara langsung melanggar aturan platform (Gerbaudo, 2021). Adaptasi ini menunjukkan bahwa estetika aktivisme digital bersifat cair dan terus berubah, seiring dengan upaya gerakan untuk menavigasi relasi kuasa yang kompleks antara ekspresi politik dan infrastruktur digital.

Paradoks estetika aktivisme digital juga tampak dalam ketegangan antara penguatan identitas internal dan perluasan jangkauan eksternal. Estetika yang sangat khas dan berakar pada budaya internal gerakan dapat memperkuat solidaritas dan rasa kepemilikan di antara pendukung inti, tetapi sekaligus membatasi keterbacaan pesan bagi publik yang lebih luas. Sebaliknya, estetika yang disesuaikan dengan selera arus utama platform dapat memperluas audiens, namun berisiko mengaburkan nilai dan identitas gerakan itu sendiri. Ketegangan ini merupakan dilema klasik budaya gerakan yang kini termanifestasi secara lebih intens di ruang digital (Cox & Flesher Fominaya, 2018).

Dalam keseluruhan dinamika tersebut, estetika aktivisme digital dapat dipahami sebagai praktik negosiasi kultural yang berlangsung secara berkelanjutan. Gerakan tidak sepenuhnya dikooptasi oleh logika platform, tetapi juga tidak sepenuhnya bebas darinya. Melalui pilihan estetika tertentu, gerakan menegosiasikan ruang visibilitas, makna, dan keberlanjutan politiknya dalam ekosistem media sosial yang didominasi oleh kepentingan korporasi (Treré, 2019). Negosiasi ini menjadi bagian integral dari praktik budaya gerakan di era platformisasi.

Secara keseluruhan, paradoks estetika aktivisme digital dalam logika platform media sosial menunjukkan bahwa estetika merupakan arena penting bagi kontestasi politik dan kultural dalam aktivisme kontemporer. Estetika menjadi titik temu antara ekspresi perlawanan dan struktur kekuasaan digital, antara idealisme gerakan dan realitas ekonomi platform. Dengan memahami paradoks ini, kajian aktivisme digital dapat melampaui pandangan yang terlalu optimistis maupun pesimistis terhadap teknologi,

dan bergerak menuju analisis yang lebih kontekstual mengenai bagaimana gerakan sosial beradaptasi dan bertahan di bawah dominasi media sosial.

Kesimpulan

Pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa estetika aktivisme digital merupakan elemen sentral dalam praktik gerakan sosial kontemporer, bukan sekadar pelengkap komunikasi politik. Estetika digital berperan penting dalam membentuk cara isu politik direpresentasikan, bagaimana identitas kolektif dikonstruksi, serta bagaimana partisipasi dan solidaritas dibangun di ruang media sosial. Melalui visual, narasi singkat, simbol, dan format khas platform, aktivisme digital menghadirkan bentuk ekspresi politik yang lebih cair, partisipatif, dan berorientasi budaya, sehingga mampu menjangkau khalayak luas sekaligus membangun budaya gerakan (*movement culture*) yang khas di era digital.

Namun demikian, estetika aktivisme digital juga beroperasi dalam kerangka logika platform yang sarat dengan kepentingan algoritmik dan ekonomi. Kondisi ini melahirkan berbagai paradoks, seperti ketegangan antara visibilitas dan kedalaman pesan, antara partisipasi simbolik dan konsolidasi politik, serta antara ekspresi perlawanan dan komodifikasi konten. Estetika aktivisme digital dengan demikian harus dipahami sebagai praktik negosiasi yang terus-menerus antara nilai-nilai gerakan dan struktur kekuasaan media sosial. Pemahaman ini menegaskan pentingnya pendekatan kultural dan kritis dalam mengkaji aktivisme digital, agar analisis tidak terjebak pada optimisme teknologi maupun skeptisisme yang berlebihan.

Daftar Pustaka

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2018). The Logic Of Connective Action: Digital Media And The Personalization Of Contentious Politics. *Journal of Communication*, 68(2), 276–292.
<https://doi.org/10.4337/9781800377585.00030>

- Boulianne, S. (2019). Revolution In The Making? Social Media Effects Across The Globe. *Information, Communication & Society*, 22(1), 39-54. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1353641>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). *Reflecting On Reflexive Thematic Analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589-597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Burgess, J., & Green, J. (2018). *YouTube: Online video and participatory culture (edisi ke-2)*. Polity Press.
- Cabanes, J. V. A., & Cornelio, J. S. (2019). *The Rise Of Trolls In The Philippines: Digital Media And The Cultivation Of Populist-Authoritarian Rhetoric*. Dalam *Routledge Handbook Of Digital Media And Communication* (hal. 345-358). Routledge.
- Chadwick, A. (2017). *The Hybrid Media System: Politics And Power (Edisi Ke-2)*. Oxford University Press.
- Chouliaraki, L. (2013). *The Ironic Spectator: Solidarity In The Age Of Post-Humanitarianism*. Polity Press.
- Cox, L., & Flesher Fominaya, C. (2018). Movement cultures. Dalam D. A. Snow, S. A. Soule, H. Kriesi, & H. J. McCammon (Eds.), *The Wiley Blackwell companion to social movements* (edisi ke-2, hal. 83-99). Wiley Blackwell.
- Cox, L., & Flesher Fominaya, C. (2018). *Movement cultures*. In D. A. Snow et al. (Eds.), *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (2nd ed.). Wiley Blackwell.
- Cox, L., & Flesher Fominaya, C. (2018). Movement cultures. In D. A. Snow et al. (Eds.), *The Wiley Blackwell Companion to Social Movements* (2nd ed.). Wiley Blackwell.
- Fiske, J. (1989). *Understanding Popular Culture*. Routledge.
- Flam, H., & King, D. (Eds.). (2021). *Emotions And Social Movements*. Routledge.
- Fraser, N. (1990). Rethinking the public sphere: A contribution to the critique of actually existing democracy. *Social Text*, (25/26), 56-80.
- Gerbaudo, P. (2021). *The Great Recoil: Politics After Populism And Pandemic*. Verso.

- Gillespie, T. (2018). *Custodians Of The Internet: Platforms, Content Moderation, And The Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. Dalam *Culture, media, language: Working papers in cultural studies, 1972-79* (hal. 128-138). Hutchinson.
- Hansen, M. B. (2012). *Cinema And Experience: Siegfried Kracauer, Walter Benjamin, And Theodor W. Adorno*. University of California Press.
- Jackson, S. J., & Foucault Welles, B. (2016). Ferguson Is Everywhere: Initiators In Emerging Counterpublic Networks. *Information, Communication & Society*, 19(3), 397-418. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1106571>
- Jackson, S. J., Bailey, M., & Foucault Welles, B. (2020). *Hashtagactivism: Networks Of Race And Gender Justice*. MIT Press.
- Jasper, J. M. (2004). A Strategic Approach To Collective Action: Looking For Agency In Social-Movement Choices. *Mobilization: An International Quarterly*, 9(1), 1-16.
- Jasper, J. M. (2018). *The emotions of protest*. University of Chicago Press.
- Kavada, A. (2020). *Collective identity*. Dalam *The Wiley Blackwell companion to social movements* (edisi ke-2, hal. 429-445). Wiley Blackwell.
- Klonick, K. (2020). The Facebook Oversight Board: Creating An Independent Institution To Adjudicate Online Free Expression. *Yale Law Journal*, 129(8), 2418–2490.
- Milan, S. (2020). Techno-symbolic agency and the public sphere: Movement cultures in the digital age. In *The Routledge Companion to Media and Activism*. Routledge.
- Milner, R. M. (2016). *The world made meme: Public conversations and participatory media*. MIT Press.
- Morozov, E. (2019). *The Net Delusion: The Dark Side Of Internet Freedom*. PublicAffairs.
- Mortensen, M. (2017). Constructing, confirming, and contesting icons: The Alan Kurdi imagery appropriated by #humanitywashedashore, Ai Weiwei, and Charlie Hebdo. *Media, Culture & Society*, 39(8), 1142-1161. <https://doi.org/10.1177/0163443717725572>

- Nova, A., & Irma, A. (2025). Media Massa dan Regulasi Penyiran: Studi Kritis atas Peran KPI Aceh dalam menjaga Nilai Lokal dan Syariat Islam. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 325–338. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i3.337>
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Pearce, K. E., Kendzior, S., & Ormeno, M. (2020). Networked collective action: A computational analysis of the #MeToo movement. *New Media & Society*, 22(3), 487–513.
- Polletta, F. (2002). *Freedom is an endless meeting: Democracy in American social movements*. University of Chicago Press.
- Polletta, F. (2002). *Movement culture*, University of Chicago Press.
- Rancière, J. (2004). The politics of aesthetics: The distribution of the sensible. Continuum.
- Shifman, L. (2014). *Memes in digital culture*. MIT Press.
- Treré, E. (2019). *Hybrid Media Activism: Ecologies, Imaginaries, Algorithms*. Routledge.
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.
- Vromen, A. (2017). *Digital citizenship and political engagement: The challenge from online campaigning and advocacy organisations*. Palgrave Macmillan.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yates, L. (2021). Prefigurative Politics And Social Movement Strategy: The Roles Of Prefiguration In The Reproduction, Mobilization, And Coordination Of Movements. *Politics, Groups, And Identities*, 9(1), 119-134. <https://doi.org/10.1177/0032321720936046>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.